

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kepariwisataan diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, wisatawan dan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 pada pasal 8, Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota (“Undang-Undang RI,” 2009).

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang bisa ditingkatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain itu sektor pariwisata bisa memperbaiki perekonomian, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga pengembangan daerah-daerah yang berpotensi objek wisata (Arraniry, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan dan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 dengan visi pembangunan kepariwisataan adalah terwujudnya Indonesia sebagai Negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat (Peraturan Pemerintah RI, 2011). Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

- a) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
- b) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

- c) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Dukungan kebijakan pemerintah daerah menjadi peran utama dalam menuju kesuksesan pengembangan sektor pariwisata. Perkembangan daya tarik wisata memberikan kontribusi yang besar, jika ditangani dengan profesional akan memberikan manfaat untuk daerah yang bersangkutan, pariwisata bisa meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan (Sihombing & Hutagalung, 2021). Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk wilayahnya, implikasi semakin besarnya tugas serta tanggung jawab untuk menggali dan dalam rangka mendukung pembangunan daerah tersebut, terdapat kemampuan sumber daya alam yang signifikan di daerah tersebut. Regulasi tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih leluasa mengelola dan meningkatkan potensi objek wisata.. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian, khususnya dalam aspek keuangan yang menjadi indikator utama kemandirian suatu wilayah, ditentukan oleh tingkat PAD. Setiap daerah pasti berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik melalui eksplorasi sumber pendapatan baru maupun dengan memaksimalkan potensi penerimaan yang telah tersedia (Nawaningsih, 2018). Sumber daya merupakan salah satu solusi yang digunakan untuk mendukung peningkatan PAD yang berasal dari sektor pariwisata (Efrintya et al., 2021).

Hal ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2025, mengenai visi pembangunan kepariwisataan daerah dengan mewujudkan daerah sebagai destinasi pariwisata bertaraf nasional dengan daya tarik utama dalam bidang Pariwisata alam, budaya, dan religi, yang tangguh

dan berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, ekonomi kreatif dan kemajuan teknologi (“Peraturan Daerah Kab.Ponorogo,” 2023). Pembangunan Kabupaten Ponorogo sebagai daerah otonomi terus dikembangkan seiring berjalannya waktu. Pariwisata terus dikembangkan di Kabupaten Ponorogo menjadi sektor utama pembangunan. Sesuai dengan misi di Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026, yaitu Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata. Ini terjadi karena pariwisata dianggap bisa menjadi partisipasi yang signifikan dalam bidang ekonomi dan sosial untuk memastikan laju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo (“Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo,” 2021).

Ponorogo dengan berbagai potensi budaya juga alam yang dapat dikembangkan, menawarkan banyak daya tarik alam, budaya, dan sejarah yang memberikan hal baru bagi wisatawan. Dengan bermodalkan kebudayaan yang kaya seperti salah satunya reog, Kabupaten Ponorogo memiliki *event* tahunan Grebeg Suro sebagai media budaya yaitu Festival Nasional Reog Ponorogo, Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka serta Larung Sesaji di Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo saat ini juga tengah membangun Monumen Reog Ponorogo yang nantinya bisa menjadi objek wisata ataupun media pengenalan sejarah reog ponorogo di masa mendatang. Lalu wisata Telaga Ngebel yang menjadi ikon wisata alam di kabupaten ponorogo.

Kabupaten Ponorogo masuk dalam KSW (Kawasan Selingkar Wilis) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Pasal (1) yang berbunyi bahwasannya dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan atas:

- a. Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan dan wilayah sekitarnya meliputi Tuban, Bojonegoro, dan Jombang yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan Gerbangkartosusila;

- b. Kawasan Bromo - Tengger - Semeru yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kawasan BTS; dan
- c. Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Hal ini bisa menjadi keuntungan untuk Kabupaten Ponorogo serta sekitar KWS (Kawasan Selingkar Wilis) untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan sektor pariwisata yang nantinya berdampak pada perekonomian regional dan nasional (Peraturan Presiden RI, 2019).

Pada tahun 2023, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena ini menarik perhatian, karena sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna memahami faktor-faktor yang mendorong peningkatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang berperan, mengidentifikasi objek wisata, strategi dinas maupun pengelola objek wisata, dan mendiskripsikan proses kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan sektor pariwisata di masa mendatang. Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada objek wisata, mengingat bahwa kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor pariwisata Kabupaten Ponorogo hanya berasal dari objek wisata yaitu dari wisata telaga ngebel dan taman wisata ngembag.

Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Upaya ini membutuhkan penanganan yang tepat dan terarah, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan instansi pemerintah yang berhubungan dengan pariwisata (Ghozali et al., 2021). Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tanggung jawab utama dalam mengembangkan sektor pariwisata, termasuk melakukan inovasi dan pengelolaan untuk memaksimalkan potensi pariwisata di daerah tersebut,

lalu Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagai lembaga yang memiliki peran mengelola pajak daerah atau menyelenggarakan dalam pemungutan pendapatan daerah serta mengordinasi instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Pada hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai sinergi untuk mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam sektor pariwisata.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana objek wisata memberikan kontribusi pada kenaikan PAD?
2. Bagaimana strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta pengelola objek wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Ponorogo tahun 2023?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini yaitu untuk

1. Untuk mengetahui bagaimana objek wisata dalam memberikan kontribusi pada peningkatan PAD.
2. Mengetahui strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta pengelola objek wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten ponorogo tahun 2023.
3. Mendeskripsikan proses kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan PAD Kabupaten Ponorogo tahun 2023.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian dari ini berfokus pada dampak yang dihasilkan dari hasil penelitian. Berikut adalah manfaatnya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran, pengetahuan baru, serta memperluas pengetahuan di bidang ilmu

pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan kontribusi masukan untuk pengembangan kebijakan pemerintah khususnya pada peningkatan Pendapatan asli daerah.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Analisis Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan atau "*policy*" berasal dari kata Yunani *polis*, yang berarti negara atau kota. Kata ini kemudian diadopsi dalam bahasa Latin menjadi *politia*, yang merujuk pada negara. Dalam bahasa Inggris, istilah ini berkembang menjadi *policie*, yang mengacu pada pengelolaan masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor, seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah, dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu (Nur & Guntur, 2019).

Menurut William, W dalam (Simatupang, 2003) Analisis kebijakan adalah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menyusun informasi, termasuk hasil penelitian, guna menghasilkan rekomendasi pilihan dalam perancangan kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri merupakan keputusan atau langkah yang diambil oleh pemerintah yang memengaruhi atau mengarahkan tindakan individu dalam kelompok masyarakat

2. Pariwisata

Hingga saat ini, belum ada definisi yang disepakati secara akademis mengenai pengertian pariwisata. Namun, secara etimologis, istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu "pari" dan "wisata". Kata "pari" memiliki arti "banyak" atau "berkeliling," sedangkan "wisata" berarti "pergi" atau "bepergian." Berdasarkan pengertian ini, pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang

dilakukan secara berulang-ulang atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya (Wirawan & Semara, 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Undang-Undang RI, 2009)

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari : (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diantaranya hasil penjualan kekayaan daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah (Karini Asti & Agustiani, 2018).

Menurut (Nasir, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari wilayah daerah dan digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Semakin tinggi PAD yang diperoleh, semakin pesat pula perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan.

4. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Undang-Undang RI, 2014).

F. LANDASAN TEORI

1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan terintegrasi adalah pendekatan dalam evaluasi dan pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek dan sektor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang lebih holistik dan koheren. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari solusi parsial dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil efektif dan efisien dalam jangka panjang. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari analisis kebijakan terintegrasi:

1. Pendekatan Multidisiplin:

- a. Menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, sosiologi, ilmu lingkungan, dan ilmu politik untuk memberikan gambaran lebih lengkap tentang masalah yang dihadapi.
- b. Menganalisis dampak kebijakan dari berbagai perspektif untuk memastikan bahwa semua aspek relevan diperhitungkan.

2. Interaksi Antar-Sektor:

- a. Mempertimbangkan bagaimana kebijakan di satu sektor (misalnya, transportasi) mempengaruhi sektor lain (misalnya, lingkungan, kesehatan).
- b. Mengidentifikasi dan mengevaluasi sinergi serta *trade-offs* antar sektor untuk membuat kebijakan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

3. Partisipasi Publik dan Stakeholder:

- a. Melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dalam proses pembuatan kebijakan.
 - b. Memastikan bahwa pandangan dan kebutuhan berbagai kelompok diperhitungkan dalam analisis kebijakan.
4. Evaluasi Dampak yang Komprehensif:
- a. Melakukan penilaian dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari berbagai opsi kebijakan.
 - b. Menggunakan alat seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis Risiko, dan Studi Kelayakan untuk menilai konsekuensi potensial dari kebijakan yang diusulkan.
5. Pendekatan Sistemik:
- a. Melihat masalah kebijakan sebagai bagian dari unsur yang lebih besar dengan berbagai komponen yang saling terkait.
 - b. Menggunakan model dan simulasi untuk memahami dinamika sistem dan memprediksi efek jangka panjang dari kebijakan.
6. Fleksibilitas dan Adaptabilitas:
- a. Membangun kebijakan yang fleksibel dan dapat disesuaikan seiring perubahan kondisi dan informasi baru.
 - b. Mengadopsi pendekatan manajemen adaptif yang memungkinkan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara terus-menerus berdasarkan hasil dan feedback.
7. Koordinasi Antar-Lembaga:
- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara berbagai lembaga pemerintah dan organisasi untuk memastikan kebijakan yang lebih terpadu.
 - b. Membentuk mekanisme kerja sama lintas sektor dan lintas lembaga untuk mengatasi tantangan kebijakan yang kompleks.

Dengan pendekatan analisis kebijakan terintegrasi, pembuat kebijakan dapat mengembangkan solusi yang lebih menyeluruh, efektif, dan berkelanjutan, serta mampu mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi masyarakat saat ini.

2. Program Pariwisata

a. Perencanaan Program Sektor Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan prioritaskan pembangunan pariwisata daerah (Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2021). Hal ini karena sektor pariwisata mempunyai pengaruh besar terhadap kontribusi ekonomi, yang berdampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat. Adapun manfaat bagi masyarakat bisa membuka peluang UMKM untuk berkembang, lalu bagi pemerintah bisa menambah sumber pendapatan asli daerah. Dunn (2000) menyatakan setiap proses pembuatan kebijakan pasti ada tahapan-tahapan. Di antaranya, yang pertama adalah fase penyusunan agenda (*Agenda Setting*), yaitu tahap di mana isu-isu penting diidentifikasi, diprioritaskan, dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan untuk mendapatkan perhatian dan tindakan lebih lanjut. Kedua, Fase berikutnya adalah fase formulasi kebijakan (*Policy Formulation*), yaitu tahap di mana berbagai alternatif solusi dirumuskan, dianalisis, dan dipertimbangkan untuk mengatasi isu yang telah ditetapkan dalam agenda. Pada fase ini, para pemangku kepentingan terlibat dalam merancang kebijakan yang paling efektif dan realistis. Ketiga, adopsi kebijakan (*Policy Adoption*) terdapat substitusi kebijakan yang dipilih dan adopsi dengan sokongan dari sebagian besar konsensus lembaga. Keempat, implemmentasi kebijakan (*Policy Implementation*) kebijakan yang ditentukan serta direalisasikan oleh bidang administrasi dengan memobilisasi sumber daya yang ada pada hal finansial serta manusia. Kelima, penilaian kebijakan (*Policy Assesment*) terdapat bidang analisa dan akuntansi yang memberikan

penilaian terhadap lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tersebut apakah telah optimal dalam pemenuhan syarat pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan (Rokim, 2019).

b. Proses Program Sektor Pariwisata

Proses pengembangan sektor pariwisata ini nantinya bisa menjadi awal yang bagus pada pengembangan dan juga pembangunan jangka panjang pada sektor-sektor lain. Pemenuhan kebutuhan publik terhadap fasilitas pariwisata akan menarik lebih banyak pengunjung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Menurut Dunn (2003), Keberhasilan dalam analisis kebijakan dapat dicapai melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap pengkajian kebijakan yang melibatkan penggunaan metodologi tertentu untuk menganalisis kebijakan secara sistematis. Kedua, tahap pembuatan kebijakan yang terdiri dari serangkaian langkah saling terkait yang diatur secara berurutan berdasarkan waktu. Ketiga, tahap komunikasi kebijakan yang berfokus pada upaya memperbaiki proses perumusan kebijakan dan memastikan hasil kebijakan tersampaikan dengan baik.

c. Pelaksanaan Program Sektor Pariwisata

Pada pelaksanaan ini dibutuhkan peran dari beberapa *stakeholder* terkait, serta penataan konsep pariwisata yang nantinya akan bisa berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Pengarahan juga perlu dilakukan oleh seseorang yang berperan sebagai pemimpin atau komando dalam koordinasi. Seorang koordinator, sebagai pemegang posisi struktural tertinggi, memiliki wewenang untuk memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata (Pebriana et al., 2021).

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan ini nantinya dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintah daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Analisis kebijakan dapat disimpulkan sebagai suatu proses untuk memperoleh pengetahuan melalui penelitian yang mengidentifikasi sebab-akibat dari suatu kebijakan. Proses ini bertujuan untuk memberikan solusi melalui berbagai alternatif program yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta menilai kinerja kebijakan tersebut.. Dalam proses pembuatan kebijakanpun perlu adanya serangkaian tahapan yang diatur menurut urutan waktu yang terdiri dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta penilaian kebijakan.

Gambar 1.1 Analisis Kebijakan



Sumber : Teori Analisis Kebijakan William N.Dunn (2000)

G. DEFINISI OPERASIONAL

Analisis kebijakan terintegrasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada objek wisata di Kabupaten Ponorogo tahun 2023 bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk memberikan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Definisi operasional ini mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk memahami dan mengimplementasikan analisis tersebut.

Elemen Kunci Definisi Operasional:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
 - a. Definisi: PAD merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
 - b. Indikator: Retribusi objek wisata
2. Strategi Dinas kebudayaan pemuda serta olahraga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pariwisata

- a. Definisi: Rencana atau usaha yang terstruktur dan sistematis untuk mengembangkan sektor pariwisata agar dapat berkembang lebih cepat, dan berkelanjutan.
 - b. Indikator: Daya tarik, sarana infrastruktur dan investasi.
3. Kebijakan Terintegrasi (Pendekatan Sistematis) :
- a. Definisi: Melihat masalah kebijakan menjadi bagian dari sistem yang lebih besar dengan berbagai komponen yang saling terkait.
 - b. Indikator: Kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait pengembangan pariwisata melalui bentuk dan rencana inovasi.

Definisi operasional analisis kebijakan terintegrasi peningkatan PAD pada sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait PAD dan sektor pariwisata, identifikasi tantangan dan peluang, serta perumusan dan implementasi kebijakan yang efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dengan pendekatan yang terukur dan terintegrasi.

H. METODOLOGI PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2013) dalam (Harahap, 2020) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dipakai guna meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, objek wisata telaga ngebel dan taman wisata ngembag, ketiganya mempunyai peran penting pada pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo.

c. Subjek Informan

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan khusus. Pertimbangan tersebut bisa berdasarkan pada pengetahuan individu yang dianggap paling relevan dengan topik yang diharapkan, adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini yaitu dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo lalu dari pihak pengelola objek wisata telaga ngebel dan taman wisata ngembag.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui *Analisis Kebijakan Terintegrasi* Peningkatan *Pendapatan Asli Daerah* Pada Objek Wisata Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 terdapat beberapa metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan

a. Wawancara

Teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*). Meskipun wawancara biasa juga memiliki peran penting, terutama sebagai tahap awal sebelum wawancara inti, wawancara mendalam diharapkan dapat menggali informasi lebih dalam mengenai hal-hal yang relevan. Tujuannya yaitu memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan mendetail mengenai topik yang sedang diteliti, serta melengkapi informasi yang diperlukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan catatan, arsip, atau dokumen yang ada di lokasi penelitian, serta sumber-sumber lain yang terkait dengan objek yang diteliti. Teknik ini penting guna memperoleh bukti tertulis atau data historis yang dapat memperkaya pemahaman dan analisis mengenai topik penelitian. Dokumentasi juga membantu dalam mengkonfirmasi informasi atau memberikan konteks yang lebih luas terhadap data yang sudah ada. Dalam mendapatkan informasi dari banyak sumber baik

secara tertulis, foto, maupun hasil rekaman suara. Dokumentasi tersebut dapat dijadikan sebagai arsip ataupun sebuah memo. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup gambar atau dokumen yang dilengkapi dengan catatan dari peneliti lain atau jurnal sebagai referensi

e. Metode Analisis Data

Menurut teori Miles, Huberman dan Saladana (2014) menerangkan bahwa aktivitas analisis data dalam sebuah penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilaksanakan secara berulang-ulang sampai tuntas sehingga datanya dapat dianalisis. Adapun tahapan dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang berarti data yang dikumpulkan bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam tanpa berfokus pada angka atau statistik. Oleh karena itu, pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi untuk penunjang, untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai objek penelitian.

b. Penyajian Data

Menurut (Rijali, 2018) penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan informasi dirangkai, selanjutnya memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, serta bagan. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang Analisis Kebijakan Terintegrasi Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Objek Wisata Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2023, serta mengilustrasikan hubungan antara unsur-unsur yang diteliti. Dengan cara ini, pembaca dapat dengan mudah memahami hasil penelitian dan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang kontribusi pemerintah dalam pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.

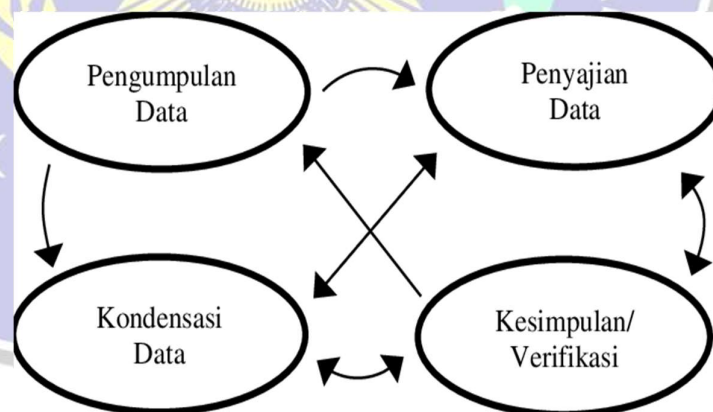
c. Kondensasi Data

Proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang diperoleh pada catatan lapangan atau hasil penelitian menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Proses ini melibatkan penentuan dimensi yang penting dan relevan dengan fokus penelitian, mengkondensasikan data, menyajikan informasi, dan menarik kesimpulan.

d. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah akhir dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyusun catatan, pernyataan, dan arahan berdasarkan hubungan sebab akibat yang ditemukan selama penelitian. Kesimpulan ini bisa bersifat sementara dan dapat berubah jika data yang ditemukan kemudian tidak mendukung atau ada temuan baru yang lebih relevan.

Gambar 1.2 Model Analisis Data



Sumber : Miles, Huberman dan Saladana (2014)